

**ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN DALAM TINDAKAN DARURAT MEDIS  
BANTUAN HIDUP DASAR DI LIHAT DARI ASPEK  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**TAUPIK ALPIYANDI**

**ABSTRAK**

Pelayanan Medis Darurat di Indonesia sampai saat ini masih terkendala implementasi dilapangan dengan tidak terjawabnya semua ekspektasi masyarakat, karena kurang efektifnya perangkat daerah atau lembaga yang menjadi tugas dan fungsinya, dari persamaan yang ada dapat diambil pertanyaan bagaimana posisi Petugas Pemadam Kebakaran bisa menjadi bagian dari tenaga kesehatan dan apakah Petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan darurat medis khususnya bantuan hidup dasar dan kemudian manfaat artikel ini jika dikaji lebih lanjut akan dapat memberikan masukan kepada para pihak dalam menentukan sejauh mana Posisi, Peran serta kewenangan Petugas Pemadam Kebakaran dalam pelayanan darurat medis dilapangan dengan pendekatan teori formulasi kebijakan, tanggung jawab serta kepastian hukum, dalam mengupas isu ini cara atau metodologi dalam meneliti menggunakan cara penelitian normatif hukum dengan bentuknya sifatnya preskriptif yang dalam meneliti berlokasi di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa study dokumen dan di kombinasi cara interview agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, dari hasil pembahasan ternyata ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada yang tidak mengacu kepada aturan diatasnya sehingga terjadi mal yuridis yang mengakibatkan rancunya kewenangan Intitusi Pemadam Kebakaran dalam Prakteka dilapangan dan tidak teraturnya Instansi pengampu dalam hal ini Kementerian yang menaungi Intitusi Pemadam Kebakaran yang harus disusun ulang semua Peraturan Perundang-undangan yang ada yang menangani atau membidangi Intitusi Pemadam Kebakaran

**Kata Kunci :** Pemadam Kebakaran, Kewenangan, Medis Darurat

# **JURIDICAL ANALYSIS OF FIRE OFFICERS' AUTHORITY IN MEDICAL EMERGENCY (BASIC LIFE SUPPORT) FROM REGULATION PERSPECTIVE**

**TAUPIK ALPIYANDI**

## **ABSTRACT**

Emergency medical services in Indonesia are still constrained by implementation in the field with unanswered all of the community's expectations, due to the ineffectiveness of the regional apparatus or institutions that are their duties and functions, from the problems that exist can take the question of how Fire Officers can become part of the Health Workforce and whether Fire Officers can carry out medical emergency measures, especially basic life support, which is then the benefit of this article if further review will be able to provide input to parties in determining the extent to which the position, role and authority of Fire Officers in medical emergency services in the field with an approach The theory of policy formulation, responsibility and legal certain, in addressing this issue the method or methodology of research using legal normative research methods with a prescriptive nature in research located at Jakarta Fire And Rescue Department, and in managing data using secondary data in the form of document studies and a combination of interview methods in order to get the maximum possible results, from the results of the discussion it turns out that some discrepancies are found in ordering existing laws and regulations that do not refer to the above rules. There is a juridical malfunction resulting in confusion over the authority of the Fire Departement in its practice and irregularity in the supervisory agency, in this case the Ministry that houses the Fire Departement, which must be rearranged all existing laws and regulations which are in charge of the Fire Departement.

**Keywords:** Fire Officers, Authority, Emergency Medical